

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yaitu pada masa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, ketika itu merupakan awal mulainya kebijakan *Desentralisasi* dimana seluruh wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk mengendalikan dan mengatur semua bentuk pelayanan yang diberikan untuk masyarakat dalam seluruh kebijakan yang terdiri atas kebijakan fiskal, politic, administrasi, serta pasar. Berdasarkan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya. Sumber daya yang dikelola semua sumber daya, baik sumber daya alam yang ada dan pengembangan sumber daya manusianya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya dengan adanya bantuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan kebijakan yang akan digunakan untuk menjalankan kebijakan Desentralisasi yang dimulai sejak tahun 1998.

Dimulainya kebijakan desentralisasi tahun 1998, mulai saat itu pula pemerintahan daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab menentukan kebijakan, mengambil keputusan, dan mengatur keuangan daerahnya secara bebas dan mandiri. Keuangan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Alokasi khusus, Dana Perimbangan. Sumber-sumber tersebut yang mengelola adalah pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Saat ini, di era desentralisasi fiskal harapannya pemerintah dapat menjalankan perannya secara efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena pembangunan daerah akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Dengan adanya investor akan berdampak pada pembangunan daerah yang akan semakin tumbuh dan berkembang. Belanja pemerintah diharapkan dapat sesuai dengan tujuan dan tepat pada sasaran sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan daerah.

Turunnya berbagai bantuan yang berupa pendanaan daerah seperti dana alokasi umum, dana dari pembagian hasil, dan dana alokasi khusus yang ditujukan kepada pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang di salurkan melalui kebijakan desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan daerah terutama untuk fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat suatu daerah. Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan sesuai dengan tujuan yang ada. sehingga, masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang sesuai.

Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga hal tersebut harus dipertahankan dalam jangka panjang. Dengan itu, maka pemerintah daerah harus memperhatikan pengeluarannya yang merupakan variabel-variabel pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga tidak terjadi penurunan pada pertumbuhannya. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting sebab, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang menjadi acuan untuk pertumbuhan ekonomi yang dapat diperoleh dari seberapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan dari seluruh sektor publik.

Belanja daerah atau yang disebut dengan pengeluaran pemerintah dapat dikaitkan dengan konsumsi. Konsumsi dibagi menjadi dua yaitu konsumsi dari pemerintah dan konsumsi dari rumah tangga. Pengeluaran pemerintah merupakan permintaan akan barang maupun jasa yang akan dikonsumsi, permintaan akan barang maupun jasa diasumsikan menjadi konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah (Mankiw, 2007). Pengeluaran pemerintah merupakan sebuah kebijakan yang menunjukkan keseluruhan biaya yang hendak dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan.

Belanja daerah merupakan variabel yang dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta jumlah keseluruhan penduduk. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari retribusi suatu daerah, pajak daerah, laba maupun pendapatan yang lain yang dilakukan oleh pemerintahan daerah (Warsito, 2001). Dana Perimbangan dapat diartikan sebagai sumber dana yang

akan berlanjut pada pemasukan APBN dan akan ditujukan untuk daerah yaitu untuk membiayai dan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah (Abdullah dan Halim, 2003).

Provinsi Banten terdiri dari 8 Kabupaten/Kota dimana memiliki letak yang strategis dikarenakan wilayah Banten terutama wilayah Tangerang Raya menjadi wilayah penyangga Jakarta disamping itu Banten juga memiliki wilayah industri dan memiliki beberapa pelabuhan yang dikembangkan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura. Provinsi Banten memiliki pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, dimana dari tahun ke tahun Provinsi Banten sudah menggunakan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan untuk daerahnya sehingga Provinsi Banten ini dikatakan sudah menjadi Provinsi yang mandiri. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Provinsi Banten tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintahan pusat.

1.1 Tabel Data PAD, Dana Perimbangan, dan Pengeluaran Pemerintah

Kabupaten/Kota	PAD		Dana Perimbangan		Pengeluaran Pemerintah	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Kota Cilegon	567	652	891	847	1.930	1.922
Kota Tangerang	1.590	1.991	1.247	1.322	4.560	4.793
Kab. Serang	590	815	1.419	1.470	2.913	3.171
Kota Tangsel	1.346	1.622	847	867	3.399	3.512
Kota Serang	126	232	825	877	1.314	1.416
Kab. Tangerang	2.054	2.786	1.843	1.928	5.713	6.194
Kab. Pandeglang	198	387	1.653	1.643	2.497	2.748
Kab. Lebak	304	467	1.620	1.442	2.759	2.691

Provinsi Banten (dalam juta rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Keseluruhan total penduduk atau disebut dengan jumlah penduduk mempunyai peran yang signifikan untuk pemerintah dalam menetapkan kebijakan ataupun ketika hendak mengambil keputusan yang ada hubungannya dengan alokasi yang bersumber dari anggaran belanja yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Banten**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari PAD terhadap pengeluaran pemerintah di provinsi Banten?
2. Bagaimana pengaruh dari Dana Perimbangan terhadap pengeluaran pemerintah di provinsi Banten?
3. Bagaimana pengaruh dari jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah di provinsi Banten?

1.3 Tujuan

1. Menganalisa pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Banten

2. Menganalisa pengaruh dari Dana Perimbangan di Provinsi Banten terhadap pengeluaran pemerintah di Provinsi Banten
3. Menganalisa pengaruh dari populasi (jumlah penduduk) terhadap pengeluaran pemerintah di Pr ovinsi Banten

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh dari variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun Jumlah penduduk (populasi) terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Banten maka diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak yang membaca.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menguraikan mengenai Bagian bab yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yang dirinci secara singkat sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menguraikan mengenai sub-bab yaitu latar belakang dari penelitian yang dilakukan, rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan, tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat dari penelitian yang dilakukan, dan sistematika penulisan penelitian yang akan dijelaskan dengan ringkas.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan mengenai sub-bab yang terdiri dari kajian pustaka, landasan teori dan hipotesis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kajian Pustaka

Pada bagian kajian pustaka ini berisi tentang pendokumentasian dan pengkajian dari hasil penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan sehingga akan menjadi bahan acuan dalam penelitian yang dilakukan ini.

2. Landasan Teori

Pada bagian landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian sebagai acuan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori berfungsi untuk memberikan diskusi secara lengkap sehingga akan dapat mengetahui hubungan dari variabel-variabel yang diteliti.

3. Hipotesis

Pada bagian hipotesis ini berisi mengenai jawaban sementara atau perkiraan mengenai rumusan masalah yang telah dikemukakan dengan penelitian terdahulu dan dengan teori yang signifikan, sehingga hipotesis yang akan disusun merupakan pernyataan sementara yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Secara keseluruhan bab kajian pustaka dan landasan teori ini membahas mengenai kajian pustaka, landasan teori dari variabel yang digunakan dalam penelitian, dan hipotesis yang digunakan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, definisi operasional dari variabel, dan metode analisis dalam penelitian.

BAB IV. HASIL, ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai diskripsi data, pengujian hipotesis yang telah dibuat, pembahasan, dan hasil penelitian serta penjelasannya.

BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan yang dilaksanakan dalam penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

